



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN :2745-7761

## EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA DI DESA KOTO RAJO KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN Kuantan Singingi

MAYA ANGELA

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi  
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi  
Email : [mayaangela350@gmail.com](mailto:mayaangela350@gmail.com)

### ABSTRAK

*Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kinerja menjadi penilaian awal berhasil tidaknya pemerintah desa dalam menyelesaikan program kerjanya baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan ataupun dalam pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah desa di Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa dengan indikator Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Dan Ketepatan yang cukup baik dilingkungan kerja pemerintah desa di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Pada kesempatan ini peneliti menyarankan agar pemerintah desa dapat mengatasi kekurangan-kekurangan dan terus meningkatkan kinerjanya baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya agar dapat mensejahterakan masyarakat Desa Koto Rajo.*

**Kata Kunci : Evaluasi, Kinerja Pemerintah Desa.**

### ABSTRACT

*Village government is the implementation of government affairs by the village government in regulating and managing the interests of the community. Performance becomes the initial assessment of whether or not the government succeeds in completing its work program either in the field of village government administration, development, coaching or in community empowerment. The purpose of this research is to find out the performance of the village government in Koto Rajo District Kuantan Hilir Seberang Kuantan Singingi. From the results of the study, it can be concluded that the performance of the village government with indicators of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Accuracy is quite good in the working environment of the village government in Koto Rajo Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi. On this occasion, researchers suggested that the village government could overcome the shortcomings and continue to improve its performance both in carrying out its duties and obligations in order to prosper the people of Koto Rajo Village.*

**Keywords: Evaluation, Performance of Village Government.**



## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam organisasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena telah menjadi sebuah kewajiban maka sepatutnya pemerintah mencari solusi terbaik terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi, termasuk kendala intern yaitu kendala yang bersumber dari dalam instansi itu sendiri maupun kendala ekstern yakni kendala yang datangnya dari masyarakat pengguna jasa dalam kaitannya dengan pelayanan umum yang ditanganinya, selain itu pula pegawai harus senantiasa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menerangkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati.

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban amanat Undang-undang penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka pemerintah membutuhkan dukungan dari aparatur pemerintah yang tangguh, professional, dan mampu berbuat lokal serta bersaing secara global. Dengan demikian pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia yang tersedia di daerahnya masing-masing.

Pengembangan suatu daerah dapat di sesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan kinerja pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Inilah kemudian yang menjadi dasar dan tujuan dari pemerintah desa dari Pemerintah Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan segala kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Desa adalah gabungan dari beberapa dusun dan rukun warga (RW). Dusun adalah bagian wilayah desa atau kelurahan merupakan lingkungan kerja pemerintah desa. Dusun dikepalai oleh kepala dusun (kadus). Sedangkan Rukun Warga merupakan gabungan dari beberapa rukun tetangga.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk



mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki pemerintah desa (yang meliputi kepala desa, dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan permusyawaratan Desa (BPD). Maka dari itu prestasi kinerja pemerintah desa haruslah baik dalam bidang masing-masing.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa harus dapat dijalankan oleh aparatur desa karena masyarakat desa telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-tengah masyarakat tersebut harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Pemerintah desa merupakan tombak strategi untuk keberhasilan semua program, karena itu upaya untuk memperkuat pemerintah desa merupakan langkah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga desa mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah desa harus dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mendukung pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan desa. Disamping itu pemerintahan desa merupakan aspek yang dianggap penting dalam rangka peningkatan dan perkembangan kinerja pemerintah desa.

Dan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Koto Rajo Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2021 bahwa prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 4 bidang utama yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Permasalahan secara umum Desa Koto Rajo di jabarkan sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  1. Desa belum ada tugu batas desa dengan desa tetangga
  2. Kepala desa dan perangkat desa belum mendapat tunjangan yang maksimal.
  3. Biaya operasional pemerintahan desa masih rendah
  4. Anggota BPD belum ada tunjangan operasional BPD yang maksimal
  5. Belum ada biaya operasional RT/RW dan Tunjangan masih rendah
  6. Aparatur desa belum dapat menyusun peraturan desa
  7. Aparatur desa belum mampu menyusun produk hukum, RPJMDes, RKP, APBDes, keuangan desa dan Administrasi
  8. Aparatur belum mampu membuat proposal kegiatan desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - Sub Bidang Insfrastruktur Dan Lingkungan Desa
    1. Masih banyak jalan yang rusak
    2. Jalan desa sering terjadi banjir karena pembangunan siring & gorong-gorong serta jembatan & tanggul penahan air belum ada



3. Saluran drainase di desa belum cukup memadai
4. Jembatan banyak yang rusak dan masih banyak jalan yang perlu jembatan
5. Tanah pemekaman belum di pagar dan belum ada gapura

Sub Bidang Sarana Dan Prasarana Kesehatan Desa:

1. Pada musim hujan banyak masyarakat terserang penyakit
2. D musim kemarau kekurangan air bersih
3. Masyarakat desa masih menggunakan MCK sembarangan, anak balita belum mendapatkan gizi yang baik & anak masih kurang mendapatkan imunisasi dasar serta petugas tidak ada honor

Sub Bidang Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Budaya:

1. Honor guru surau belum memadai
2. Tenaga didik Guru PAUD dan TK
3. PAUD/TK/KB/SPS/TPA belum memadai biaya operasional
4. Anak balita belum semua mendapatkan pendidikan PAUD dan TK dan guru Kurang Pendapatannya
5. Siswa SD yang kurang mampu
6. Pelaksanaan kegiatan PAUD/TK belum semua berjalan optimal

Sub bidang sarana dan prasarana ekonomi:

Lahan perkebunan & perikanan masih banyak belum dimanfaatkan

1. Di musim kemarau penghasilan petani karet kurang, karena karet susut
2. Keterbatasan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah kurang sadarnya petani untuk merawat kebunnya

Sub bagian pelestarian lingkungan hidup

1. Jalan dilingkungan banyak yang tak ada gorong-gorong
2. Jalan desa sering terjadi banjir karena pembangunan siring & gorong-gorong serta jembatan & tanggul penahan air belum ada
3. Jalan menuju ke kebun masyarakat masih banyak yang tidak bagus
4. Bila mana terjadi hujan lebat air tidak tertampung karena saluran air kurang maksimal dan sering kali air menggenang dijalan/perumahan warga
5. Drainase tidak ada

c. Bidang pemberdayaan kemasyarakatan

1. Masih banyak rumah yang belum layak huni
2. Desa belum ada pos ronda permanen di setiap dusun
3. Desa belum mempunyai gedung serbaguna untuk kegiatan olah raga dan kegiatan seni
4. Kegiatan PKK desa belum semuanya berjalan
5. Pelaksanaan kegiatan posyandu belum semua berjalan
6. Pelaksanaan kegiatan sanggar seni dan budaya belum semua berjalan
7. Pelaksanaan kegiatan LPM belum berjalan
8. Pelaksanaan kegiatan karang taruna belum semua berjalan
9. Pelaksanaan kegiatan hansip dan linmas belum berjalan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Organisasi masyarakat adat kurang pembinaan

Berdasarkan hasil observasi penulis pemerintah desa masih belum secara efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut, dapat dilihat dari beberapa bidang yang belum bisa diselesaikan seperti:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



Masih belum ada tugu batas desa dengan desa tetangga karena pemerintah desa kurang memperhatikan hal tersebut karena pemerintah desa hanya berfokus pada pelaksanaan pembangunan desa dalam bidang olah raga. dan dalam pelaksanaan administrasi masih belum terlaksana dengan maksimal kerana masih terkendala oleh kepentingan pribadi.

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa

Dalam bidang pembangunan masih kurang optimalnya Hasil Kebijakan yang telah di capai oleh pemerintah karena dapat ditandai dengan masih banyak jalan yang rusak, pembangunan drainase di desa belum cukup memadai, Bila mana terjadi hujan lebat air tidak tertampung karena saluran air kurang maksimal dan sering kali air menggenang di jalan/perumahan warga karena aliran Tidak lancar /pembuangan air jalan tertutup karena pelebaran jalan sehingga aliran tidak lancar dan kurangnya pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah serta kurang sosialisasi lingkungan yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat sehingga masyarakat yang rumahnya dekat drainase banyak yang membuang sampah ke tempat ke aliran drainase mengakibatkan air menggenang di jalan ketika hujan lebat.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Dalam bidang pembinaan kemasyarakatan belum berjalanhal ini dapat di ditandai dengan tidak adanya pemerintah desa dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya manusia serta tidak berjalannya lembaga permusyawaratan masyarakat desa Dan pelaksanaan kegiatan karang taruna belum berjalan, dan pelaksanaan Kegiatan Hansip dan Linmas belum berjalan sebagai mestinya.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam bidang pemberdayaan Masyarakat masih belum terealisasi karena dapat dilihat dari Organisasi masyarakat adat kurang pembinaan seharusnya pemerintah desa dapat melakukan perbaikan kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan masalah yang belum dapat diselesaikan dengan baik maka penulis tertarik sekali untuk mengangkat suatu penelitian dengan judul penelitian **EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DESA DI DESA KOTO RAJO KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi ?

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan sebagai :



1. Bahan informasi dan kontribusi pemikiran kepada pemerintah Desa Koto Rajo dan masyarakat serta kepada semua pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa pada masyarakat.
2. Pihak akademis dan peneliti lainnya sebagai masukan dalam mengkaji lebih lanjut tentang evaluasi kinerja pemerintah desa di desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitan ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri.

Menurut Husaini Usman (2014:129), kata Deskriptif berasal dari bahasa Inggris, *descriptive*, yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Sedangkan menurut Arikunto (2010:278), kualitatif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya dan hasil wawancara.

Informan yang peneliti ambil

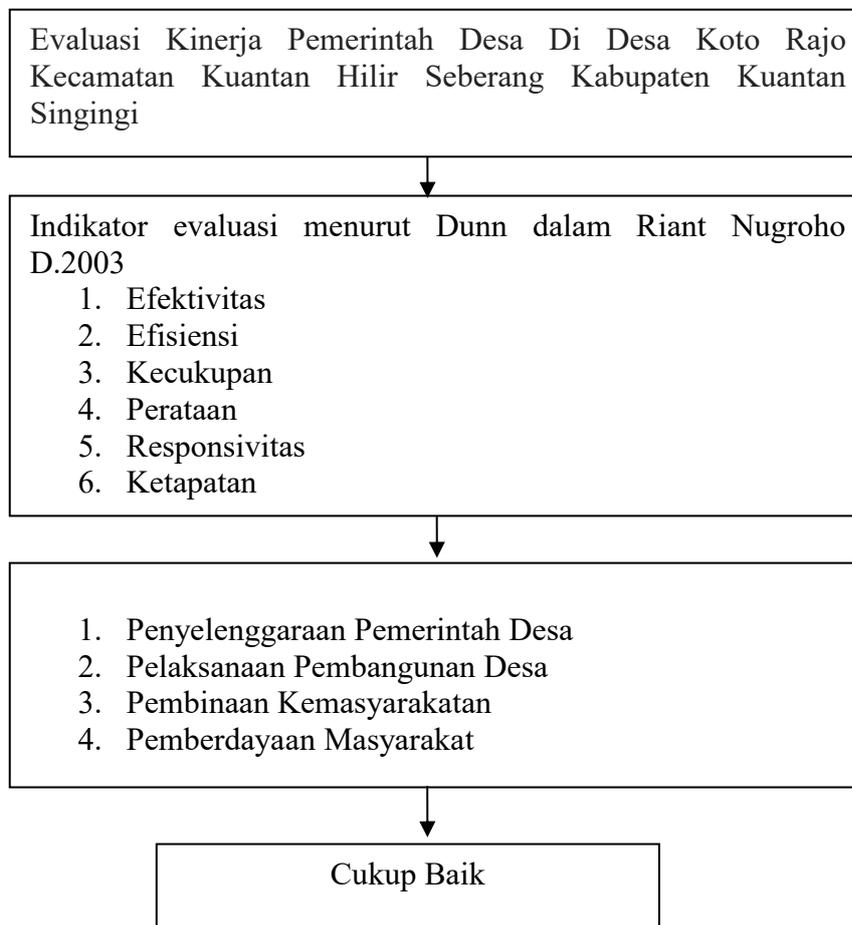
**Table 1.1 : Jumlah Informan Penelitian Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	informan	Jumlah
1	Seksi Keuangan Dan Asset Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1
2	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1
3	Kepala Desa	1
4	Sekretaris Desa	1
5	Kaur Pemerintahan	1
6	Kasi Keuangan	1
7	Kaur Umum	1
8	Kaur Pembangunan	1
9	Kepala Dusun	3
10	Ketua BPD	1
11	Anggota BPD	3
12	Tokoh Masyarakat	3
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

Sumber : *Olahan data 2020*



### **Kerangka Pemikiran**



*Sumber : Modifikasi Peneliti 2020*

### **LANDASAN TEORI**

#### **Teori Administrasi Negara**



Secara Etimologi, administrasi berasal dari bahasa Yunani “Administrare” atau *administrer* yang berarti mengendalikan, mengelola atau menangani urusan. Urusan seperti negara, pemerintahan, rumah tangga ataupun pengelolaan suatu negara bisnis atau usaha.

Administrasi negara adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparatur negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien. Administrasi negara merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif serta eksekutif dan hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik.

Ciri-ciri Administrasi negara menurut Thoha (2008 : 36-38) adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi Negara Adalah Suatu Kegiatan Yang Tidak Bisa Dihindari.  
Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga negara maupun orang asing.
- b. Administrasi Negara Memerlukan Adanya Kepatuhan.

Hal ini Administrasi Negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

- c. Administrasi Negara Mempunyai Prioritas  
Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh Administrasi Negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.
- d. Administrasi Negara Mempunyai Ukuran Yang Tidak Terbatas  
Besarnya lingkup kegiatan Administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.
- e. Pimpinan Atasnya bersifat politis  
Administrasi Negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari Administrasi Negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- f. Pelaksanaan Administrasi Negara Adalah Sangat Sulit Diukur.  
Oleh karena kegiatan Administrasi negara sebgaiannya bersifat politis dan tujuan diantaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.
- g. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara.  
Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki Administrasi Negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain Administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

## **Teori Evaluasi**

Kata evaluasi berasal dari Bahasa Inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang



terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut Subarsono (2016:119) Evaluasi kegiatan yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja suatu Kebijakan, Evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada diluar lingkungan politik.

### **Teori/ Kinerja**

Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan tugas organisasi, baik itu dalam lembaga pemerintahan maupun swasta. Kinerja berasal dari bahasa *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang atau suatu institusi).

Menurut mangkunegara (2012: 9) kinerja karyawan ( prestasi kerja ) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut sedarmayanti (2012:260) kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti hasil kerja seseorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara seluruh, dimana hasil kerja tersebut harus dapat di tunjukkan bukti secara konkrit dan dapat di ukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan )

Menurut wibowo (2010:7) kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang di capai dari pekerjaan tertentu.

Kinerja juga dapat di artikan sebagai prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu.adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan.

### **Teori Administrasi Pemerintah Desa**

Menurut Rauf & Maulidiah (2015:19), mengatakan desa di indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintah desa, pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian tentang Pemerintah Desa dinyatakan, yakni: “Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat (3), bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa. Berdasarkan tentang pengertian pemerintah desa, Menurut Rauf & Maulidiah (2015:20), unsur pemerintah desa perlu untuk dipahami beberapa hal, yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Pemangku Desa
2. Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain
3. Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
4. Pemerintah Desa disebut dengan unsur penyelenggara pemerintah desa.

Menurut pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem



pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Menurut pasal 25 Undang-undang Republik indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

### **Teori Manajemen Sumber Daya Manusia**

Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan, dan Pengawasan.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga secara Efisien dan Efektif sehingga tercapai tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah dunia penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu atau organisasi.

G.R.Terry mengatakan manajemen adalah proses yang berbeda yang terdiri perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang dinyatakan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya (Anwar 2016 : 07).

Tujuan dari organisasi manajemen sumber daya manusia merupakan pencapaian tujuan yang diinginkan. Mencapai tujuan yang ingin di capai dengan baik dibutuhkan sumber daya manusia dalam kelancaran dalam bekerjanya suatu organisasi.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Indikator yang digunakan oleh peneliti adalah Indikator evaluasi menurut Dunn dalam Riant Nugroho D.2003

Tanggapan informan saat peneliti melakukan wawancara tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan menggunakan indikator evaluasi:

#### **1. Efektivitas**

Efektifitas dari pemerintah desa masih terbilang kurang dengan di tandai dengan banyaknya hal-hal yang harusnya sudah terlaksana namun belum terlaksana sehingga hasilnya tidak memuaskan karena kelalaian pemerinta desa dalam menjalankan tugasnya. Dan di desa koto rajo Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa tidak berjalan seharusnya kepala desa mampu menggerakkan warga untuk aktif dalam kegiatan pengembangan desa sehingga desa bisa menjadi lebih baik dan maju

#### **2. Efisiensi**

Efisiensi Sudah Cukup Baik, Terlihat Dari Hasil Wawancara Mengatakan Usaha Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Sudah Cukup Baik Tetapi Masih Tergantung Pada Kondisi Keuangan Desa.

#### **3. Kecukupan**



kecukupan sudah dapat dikatakan cukup baik karena pemerintah sudah ada solusi yang diberikan kepada masyarakat dalam memecahan masalah dan mengambil langkah tindak lanjut dalam melakukan penyelesaian masalah.

4. Perataan

Dapat di simpulkan dapat dikatakan cukup baik karena pemerintah telah berupaya untuk mendistribusikan kebutuhan masyarakat walaupun belum terlaksana secara merata karena masih terkendala oleh kondisi keuangan desa.

5. Responsivitas

Responsivitas ini dapat dikatakan cukup baik karena tanggapan masyarakat kepada kebijakan pemerintah mengenai kebutuhan sudah cukup baik walaupun tidak semua masyarakat merespon kebijakan tersebut.

6. Ketepatan

Dapat di simpulkan bahwa Ketepatan pemerintah desa sudah dapat dikatakan cukup baik yaitu dapat dilihat dari bergunanya hasil kinerja pemerintah bagi masyarakat dan juga adanya laporan pertanggung jawaban yang di serahkan kepada Badan permusyawaratan desa dan juga menyampaikan kegiatan pembangunan secara langsung kepada masyarakat melalui spanduk yang berisikan laporan yang berisikan kegiatan yang berlangsung di desa.

Berdasarkan tanggapan informan diatas Dari hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukan Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Koto Rajo baik dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Sudah Cukup Baik. Serta Observasi Di Lapangan Yang Menunjukkan Memang Sudah Cukup Baik Dalam Melaksanakan Kinerjanya Baik Dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

## **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan mengenai evaluasi kinerja pemerintah desa di desa Koto Rajo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi dapat peneliti simpulkan bahwa kinerjanya cukup baik.

## **Saran**

Sebagai tahap akhir penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran kepada pemerintah desa Koto Rajo yaitu

1. Cara meningkatkan hasil kinerja Pemerintah Desa agar mencapai hasil yang optimal adalah dengan adanya pelatihan mengenai tugas dan fungsi sehingga seluruh aparatur nantinya dapat melaksanakan tugasnya secara profesional demi berjalannya pemerintahan dan pembangunan desa.
2. Untuk mengulangi hambatan kerja Pemerintah Desa hendaknya lebih meningkatkan kerjasama dengan Perangkat Desa BPD dan masyarakat setan meningkatkan koordinasi dengan dengan pihak Kecamatan dan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Pemerintah Desa harus berupaya lagi dalam meningkatkan sumber daya manusianya dengan cara belajar sehingga pengetahuan tentang desa mengalami peningkatan.



4. Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa terkait kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Tokoh masyarakat hendaknya memberikan dukungan kepada pemerintah desa untuk lebih meningkatkan kerjanya berupa dengan adanya kritikan serta saran yang diberikan kepada pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Rusyan, Tabrani 2018, *Membangun Efektifitas Kinerja Kepala Desa*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Rahmawati, Ike Kusdyah,2018, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta
- Badrudin 2017, *Dasar-Dasar Manajemen*, Alfabeta Cv, Jakarta
- Kasmir, 2016, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Rajawali, Jakarta
- Syafiee, M.Si. 2013, *Sistem Adminstrasi Negara Republic Indonesia( SANRI)*, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta
- Dwijowijoto, Nugroho,Riand,2003,*Kebijakan Public, Formulasi, Imlementasi, Dan Evaluasi*, Penerbit PT Elek Media Komputindo, Jakarta
- Afandi, Dr, Pandi, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori, Konsep, Dan Indicator*, Penerbit Nusa Media, Yogyakarta
- Sugiono, 2009, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sugiono, 2010, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Dewi, Siska, 2018, *Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi, UNIKS
- Wulandari, Wilki, 2018, *Analisis Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi, UNIKS



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

Sukri, Ahmat, 2019, *Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa (MUSREMBANGDES) di Desa Pulau Komang Sentajo Raya Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi, UNIKS

Enjela, Sundari, 2020, *Evaluasi Peleyanan Public Di Kantor Desa Lubuk Terentang ,Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi*, Skripsi, UNIKS

### **DOKUMEN/PERUNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Desa

Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa